



# Meluhurkan Kemanusiaan

Kumpulan Esai untuk **A. Sudiarja**

Editor **F. Wawan Setyadi**



# MELUHURKAN KEMANUSIAAN

Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja

Editor

F. Wawan Setyadi



**MELUHURKAN KEMANUSIAAN**

Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja

Copyright© 2018, F. Wawan Setyadi

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

oleh Penerbit Buku Kompas, 2018

PT Kompas Media Nusantara

Jl Palmerah Selatan 26-28

Jakarta 10270

E-mail: buku@kompas.com

Editor: F. Wawan Setyadi

Penyalaras Bahasa: R.B.E. Agung Nugroho

Perancang Sampul: Wiko Haripahargio

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xiv + 274 hlm.; 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-412-510-3

eISBN: 978-602-412-511-0

KMN: 581812103

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor

**DAFTAR**

Pendahuluan: Meluhurkan Kemanusiaan

**F. Wawan Setyadi** .....

Para Yesuit di Indonesia pada Abad Baru  
Berhadapan dengan Tradisi Hindu

**Gregorius Budi Subanar** .....

Filsafat Advaita-Vedanta Śāṅkarā

**Matius Ali** .....

*Silence* (Hening)—Provokasi Hidup

**Simon Petrus L. Tjahjadi** .....

Jeda Di Antara Kata-Kata

**Karlina Supelli** .....

Agenda Yang Masih Tersisa Dari Masa

**Al. Andang L. Binawan** .....

# DAFTAR ISI

Pendahuluan: Meluhurkan Kemanusiaan <b>F. Wawan Setyadi</b> .....	vii
Para Yesuit di Indonesia pada Abad XIX-XX Berhadapan dengan Tradisi Hindu-Buddha <b>Gregorius Budi Subanar</b> .....	1
Filsafat Advaita-Vedanta Śaṅkarācārya <b>Matius Ali</b> .....	27
<i>Silence</i> (Hening)—Provokasi Hidup Beragama <b>Simon Petrus L. Tjahjadi</b> .....	49
Jeda Di Antara Kata-Kata <b>Karlina Supelli</b> .....	73
Agenda Yang Masih Tersisa Dari Kebebasan Beragama <b>Al. Andang L. Binawan</b> .....	99

Negara-Pancasila Menurut Driyarkara: Melacak Asal-Usul dan Artinya <b>A. Setyo Wibowo</b> .....	115
Agama, Ruang Publik, dan Tantangan Era Pasca-Kebenaran <b>J. Sudarminta</b> .....	157
Toleransi dan Budi Luhur <b>Franz Magnis-Suseno</b> .....	171
Dari Humanisme Ke Posthumanisme <b>M. Sastrapratedja</b> .....	183
Humanisme dan Refleksi dalam Pengajaran Sastra di Era Multimedia <b>Novita Dewi</b> .....	195
Intensionalitas dan Atensi dalam Dunia Digital <b>Thomas Hidya Tjaya</b> .....	215
Teknologi Modern Menurut Martin Heidegger <b>Hieronimus Yoseph Dei Rupa</b> .....	235
Indeks.....	255
Riwayat Hidup A. Sudiarja .....	269
Daftar Penulis .....	272

Pendahuluan

# MELUHURKAN KEMANUSIAAN

F. Wawan S

Telah menjadi sebuah kebiasaan memberikan kado berupa kunyit kolega yang merayakan ulang tahun di dalam bunga rampai dipersiapkan Sudiarja yang pada 2018 ini genap tulisan dari para sahabat sejawat ini perayaan, ungkapan syukur, ucapan bagi beliau, atas segala kontribusi la ketekunan nan hening terus dilak berbagai tulisan, terjemahan, pe filsafat dan humaniora selama ini.

Antonius Sudiarja adalah se memulai pertemuannya dengan du masa formasi sebagai calon imar Driyarkara pada 1975-1978. Pert pernah usai karena di masa selar tugas untuk menjalankan studi kl setelah menyelesaikan studinya d ke Roma untuk mengambil licentia

# NEGARA-PANCASILA MENURUT DRIYARKARA: MELACAK ASAL-USUL DAN ARTINYA

A. Setyo Wibowo

## I. Pengantar

Nicolaus Driyarkara, S.J. (1913-1967) memberikan sumbangan sangat khas dalam teksnya "Pancasila dan Religi" ketika menafsirkan Negara-Pancasila "bukan sebagai Negara-Agama, bukan pula sebagai Negara-Sekuler". Posisi unik ini sangat relevan untuk diangkat manakala akhir-akhir ini Indonesia kembali berhadapan dengan gerakan-gerakan yang cenderung merangsekkan tafsir agama dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, dengan berkaca pada tahun 1960-an, tafsiran Driyarkara akan dikontraskan dengan tafsiran yang mewakili posisi sebaliknya—yang mengusung tafsir atas Pancasila sebagai Negara-Agama. Artikel ini hendak menyajikan tafsir Driyarkara tentang Negara-Pancasila sebagai "sistem bernegara yang memilah agama dan negara sekaligus memelihara dimensi religius". Bila umumnya pemikiran Driyarkara tentang negara banyak dikaitkan dengan filsafatnya tentang manusia, artikel ini hendak melacak asal-muasal tafsiran Driyarkara tentang Negara-

Pancasila dari praktik politik para tokoh Katolik pendahulunya di tahun 1950-an—I.J. Kasimo dan Mgr. A. Soegijapranata, S.J.—dan secara spesifik dikaitkan dengan nasionalisme "sekuler" yang telah diangkat sang perumus Pancasila, Soekarno, pada tahun 1920-an.

## II. Nasionalisme "Sekuler" Soekarno

Menurut M.C. Ricklefs,<sup>1</sup> pada sekitar tahun 1920-an, Soekarno mulai meyakini semacam nasionalisme "sekuler"—yang di Pancasila nanti, tampak dalam sila Ketuhanan yang tidak merujuk pada Tuhan dari salah satu agama yang ada dan sila Persatuan Indonesia.

Soekarno menemukan "suatu bentuk nasionalisme yang tidak mengandung komitmen tertentu terhadap Islam". Menurut Ricklefs,<sup>2</sup> nasionalisme ini tidak memiliki muatan positif karena terutama berisi perlawanan (terhadap penjajah), serta penolakan pada ide pembaruan sosial lewat agama Islam atau ide sosial (Marxisme). Ide ini oleh Ricklefs dinamai *Nasionalisme "Sekuler"*,<sup>3</sup> karena di dalamnya memuat pencarian identitas nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan.<sup>4</sup> Musuh utama Soekarno dalam hal ini adalah Mohammad Natsir (1908-1993) dan H. Agus Salim (1884-1954). Kedua orang ini percaya bahwa "hanya Islam yang dapat menjadi dasar bagi suatu kebangsaan Indonesia.... Para pemimpin Islam modernis mencela nasionalisme karena paham ini merupakan ide manusia padahal Islam merupakan wahyu dari Tuhan...."<sup>5</sup>

"Bagi Soekarno, cara kaum abangan<sup>6</sup> Jawa, dan terutama golongan atas di antara mereka itu, menyerap ide-ide Hindu,

1 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Cetakan pertama 2005 (Terj. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* [2001], Edisi ke-3. Hampshire, Inggris: Palgrave) (Jakarta: P.T. Serambil Ilmu Semesta, 2007), hlm. 376-391.

2 Ibid. hlm. 377.

3 Ibid. hlm. 378-379.

4 Ibid. hlm. 382.

5 Ibid. hlm. 391.

6 Gregorius Budi Subanar, *The Local Church in the Light of Magisterium Teaching on Mission: A Case in Point: The Archdiocese of Semarang—Indonesia (1940-1981)* (Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2001), hlm. 141. Mengikuti studi Clifford Geertz (*Religion in Java*) tentang tiga kelompok golongan di Jawa dalam cara mereka beragama. "Abangan is associated with the person whose profession was servant or manual worker. The orientation belief of abangan stressed the animistic element of the Javanese syncretism. Santri is a pure Islam adherent. (...) Priyayi originally referred to the hereditary aristocracy. Then, it referred also to the salaried civil service. The orientation belief stressed on Hinduism."

Buddha, Islam, dan Barat ke dalam s  
mereka anggap memuaskan, tampa  
seluruh bangsa Indonesia."<sup>7</sup>

Di sekitar tahun 1920-an ini, ide n  
oleh hampir kebanyakan aktivis keme  
yang menjelaskan mengapa ide na  
diterima di banyak kalangan:

"Gagasan nasionalisme seluruh  
umum kini muncul semakin kuat  
kelompok-kelompok suku bangsa  
konsep itu antara lain sebagai alat  
dari dominasi suku Jawa yang pote  
kelompok Kristen memandang k  
sebagai alat untuk mempertahankan  
Beberapa kalangan komunitas Cina  
nasionalisme Indonesia atas dasar

Agus Salim menolak ide nasiona  
kebarat-baratan. Kaum Muslim men  
awal, prinsip ini dianggap tidak pe  
kampung-kampung—utamanya kaur  
secara umum sikap beragamanya  
terikat dengan ulama-ulama lokal me

Satu hal penting mesti dicatat, kat  
di antara tanda kutip ("...") karena k  
saat itu tetaplah beragama. Soekarno  
kaum komunis yang secara eksplisit

Rumusan Pancasila yang kita mil  
di tahun 1920-an dalam diri Soek  
dia terobsesi oleh gagasan nasiona  
bangsanya yang terpecah-pecah da  
agama, dia melihat bahwa ide "s  
menyatukan semua pihak. Meski is  
mula harus disepakati bahwa ide pe

7 Bdk. Ricklefs, Op.Cit., hlm. 377.

8 Ibid. hlm. 379.

9 Ibid. hlm. 379-380.

Buddha, Islam, dan Barat ke dalam suatu sintesis yang unik yang mereka anggap memuaskan, tampaknya merupakan model bagi seluruh bangsa Indonesia."<sup>7</sup>

Di sekitar tahun 1920-an ini, ide nasionalisme "sekuler" diamini oleh hampir kebanyakan aktivis kemerdekaan. Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa ide nasionalisme "sekuler" mudah diterima di banyak kalangan:

"Gagasan nasionalisme seluruh Indonesia sebagai ukuran umum kini muncul semakin kuat. Para pemimpin terpelajar kelompok-kelompok suku bangsa dan kedaerahan menerima konsep itu antara lain sebagai alat untuk mempertahankan diri dari dominasi suku Jawa yang potensial, sedangkan kelompok-kelompok Kristen memandang konsep tersebut antara lain sebagai alat untuk mempertahankan diri dari dominasi Islam. Beberapa kalangan komunitas Cina dan Arab juga mendukung nasionalisme Indonesia atas dasar multirasial."<sup>8</sup>

Agus Salim menolak ide nasionalisme "sekuler" sebagai terlalu kebarat-baratan. Kaum Muslim memang terpecah posisinya. Sejak awal, prinsip ini dianggap tidak peka terhadap kaum Muslim di kampung-kampung—utamanya kaum Nadhlatul Ulama (NU)—yang secara umum sikap beragamanya masih tradisional dan sangat terikat dengan ulama-ulama lokal mereka.<sup>9</sup>

Satu hal penting mesti dicatat, kata "sekuler" di sini selalu ditaruh di antara tanda kutip ("...") karena kaum nasionalis pada umumnya saat itu tetaplah beragama. Soekarno adalah seorang Muslim. Hanya kaum komunis yang secara eksplisit menolak agama.

Rumusan Pancasila yang kita miliki saat ini bisa dilihat benihnya di tahun 1920-an dalam diri Soekarno. Sejak awal perjuangan, dia terobsesi oleh gagasan nasionalisme yang "sekuler". Melihat bangsanya yang terpecah-pecah dalam berbagai etnis, ras, dan agama, dia melihat bahwa ide "sekuler" seperti itu yang bisa menyatukan semua pihak. Meski istilahnya "sekuler", sejak awal mula harus disepakati bahwa ide persatuan nasional yang digagas

7 Bdk. Ricklefs, *Op.Cit.*, hlm. 377.

8 *Ibid.* hlm. 379.

9 *Ibid.* hlm. 379-380.



Soekarno selalu merangkumi di dalamnya kepekaan religius dari agama-agama.

Menurut Yudi Latif,<sup>10</sup> pada tahun 1920-an, sebagai orang muda, Soekarno bergulat dengan keyakinan-keyakinan. Dalam pengakuan Soekarno sendiri, "Kakekku menanamkan pada diriku kebudayaan Jawa dan mistik. Dari Bapak datang teosofi dan Islamisme. Dari Ibu, Hinduisme dan Buddhisme. Sarinah memberiku humanisme. Dari Pak Cokro, datang sosialisme. Dari kawan-kawannya, datang nasionalisme."<sup>11</sup>

"Tahun 1926 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam tiga dimensi. Dimensi yang kedua dari tiga hal itu adalah Ketuhanan. Aku banyak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. *Bahkan, selagi aku melangkah ragu pada awal jalan yang menuju pada Ketuhanan, aku tidak melihat Yang Mahakuasa sebagai Tuhan seorang. Menurut jalan pikiranku, kemerdekaan bagi kemanusiaan meliputi juga kemerdekaan beragama.* Ketika konsep keagamaanku melebar, ideologi dari Pak Cokro dalam pandanganku menjadi semakin sempit dan semakin sempit. Pandangan Pak Cokro tentang kemerdekaan untuk Tanah Air kami terasa kaku karena ditinjau melalui lensa mikroskop agama Islam."<sup>12</sup>

10 Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Cetakan pertama 2014 (Jakarta: Penerbit Mizan, 2017), hlm. 26-27.

11 Ibid. Yudi Latif mengutip Cindy Adams. Bdk. Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Terj. Syamsu Hadi), Edisi Revisi cetakan ke-5 (Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo, 2018), hlm. 90. Soekarno sangat yakin bahwa apa yang dia angkat adalah khas Indonesia. Di halaman 90, dia berujar bahwa Sosialisme yang dia angkat bersifat khas Indonesia karena tidak memasukkan unsur materialisme ekstrim. Soekarno paham bahwa "bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Sosialisme kami adalah suatu campuran. Kami mengambil persamaan politik dalam *Declaration of Independence* dari Amerika. Kami mengambil persamaan spiritual dari Islam dan Kristen. Kami mengambil persamaan ilmiah dari Marx. Ke dalam campuran ini, kami tambahkan kepribadian nasional: Marhaenisme. Kemudian, kami memercikkan ke dalamnya gotong-royong, yaitu semangat, hakikat dari bekerja bersama, hidup bersama, dan saling bantu-membantu. Kalau ini dicampurkan semua, maka hasilnya adalah Sosialisme Indonesia. Konsep-konsep ini telah kuletakkan sejak tahun 1920-an dan tak pernah aku menyimpang daripadanya. Konsep ini memang tidak tersusun dengan rapi sesuai dengan alam pikiran Barat. Tapi Anda harus ingat, aku memang tidak memiliki dasar pemikiran Barat. Aku selalu berpikir dengan cara pandang mentalitas Indonesia."

12 Ibid. Yudi Latif mengutip Cindy Adams, hlm. 88. Kutipan Yudi Latif ditulis dalam huruf miring (*italics*).

Meski di situ Soekarno tegas mekemanusiaan meliputi juga kemerdekaan hanya menekankan pentingnya agama menjadi Indonesia. Tampaknya pemnegara—gagasan yang khas dari BaraSoekarno.

### III. Perdebatan Rumusan Pancasila

Perdebatan saat proses perumusan (1 Juni dan 10-17 Juli 1945) mempertayang pro pemisahan agama dan negara: dan ada yang tidak sepenuhnya mem

Yudi Latif memberikan beberapa mengenai perdebatan soal Ketuhana golongan dalam BPUPKI yang bisa di satu sisi, kaum kebangsaan, yaitu negara hendaknya netral terhadap Muslim yang berkeyakinan bahwa ne agama.<sup>13</sup>

Kelompok *pertama*, kelompok netralitas negara di depan agama te Golongan (a) ada yang menghennegara (Yudi Latif<sup>14</sup> memberikan n yang menegaskan perlunya pemisahnegara, Soepomo, Wongsonagoro, Ra Poerbonegoro Soemitro Kolopaking, (b) tidak sepenuhnya memisahkan a memberi nama: Soekarno, M. Yamin, A Dan golongan (c) merangkumi to yang malahan ingin menerapkan s sungguh (Yudi Latif<sup>16</sup> memberi nama Syamsudin, R. Abdoelrahim Pratalykr

Kelompok *kedua*, golongan Islam tidak bisa dipisahkan dari agama. M orang di kalangan ini yang tidak m

13 Ibid. hlm. 9.

14 Ibid. hlm. 119, dalam catatan kaki no. 9.

15 Ibid., dalam catatan kaki no. 10.

16 Ibid., dalam catatan kaki no. 11.

Meski di situ Soekarno tegas menyatakan “kemerdekaan bagi kemanusiaan meliputi juga kemerdekaan beragama”, gagasan ini hanya menekankan pentingnya agama dalam negara yang nanti menjadi Indonesia. Tampaknya pemisahan mengenai agama dan negara—gagasan yang khas dari Barat—belum masuk dalam pikiran Soekarno.

### III. Perdebatan Rumusan Pancasila

Perdebatan saat proses perumusan Pancasila di BPUPKI (28 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945) mempertegas posisi-posisi yang ada: ada yang pro pemisahan agama dan negara, ada yang mencampurkannya, dan ada yang tidak sepenuhnya memisahkan agama dan negara.

Yudi Latif memberikan beberapa data menarik untuk ditimbang mengenai perdebatan soal Ketuhanan di BPUPKI saat itu. Ada dua golongan dalam BPUPKI yang bisa dianggap saling bertentangan: di satu sisi, kaum kebangsaan, yaitu mereka yang bersikap supaya negara hendaknya netral terhadap agama, dan di sisi lain, kaum Muslim yang berkeyakinan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama.<sup>13</sup>

Kelompok *pertama*, kelompok kebangsaan yang menghendaki netralitas negara di depan agama terbagi dalam beberapa nuansa. Golongan (a) ada yang menghendaki pemisahan agama dan negara (Yudi Latif<sup>14</sup> memberikan nama-nama: Mohammad Hatta yang menegaskan perlunya pemisahan antara urusan agama dan negara, Soepomo, Wongsonagoro, Radjiman Wedyodiningrat, R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking, dan J. Latuharhary). Golongan (b) tidak sepenuhnya memisahkan agama dari negara (Yudi Latif<sup>15</sup> memberi nama: Soekarno, M. Yamin, A.A. Maramis, dan A. Soebardjo). Dan golongan (c) merangkumi tokoh di kalangan kebangsaan yang malahan ingin menerapkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh (Yudi Latif<sup>16</sup> memberi nama: R.A.A. Wiranatakoesoema, R. Syamsudin, R. Abdoelrahim Pratalykrama).

Kelompok *kedua*, golongan Islam, mengatakan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Namun, meski begitu, ada juga orang di kalangan ini yang tidak menghendaki adanya penyatuan

13 Ibid. hlm. 9.

14 Ibid. hlm. 119, dalam catatan kaki no. 9.

15 Ibid., dalam catatan kaki no. 10.

16 Ibid., dalam catatan kaki no. 11.

sepenuhnya (Yudi Latif<sup>17</sup> memberi nama: H. Agus Salim dan R. Abikusno Cokrosuyoso). Salah satu wakil dari golongan Islam, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dalam pidatonya menyatakan: (i) agama adalah pangkal persatuan, (ii) Islam tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita.

Sementara di pihak kebangsaan, Soepomo menolak gagasan Negara Islam. Alasan Soepomo adalah (i) mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan; (ii) mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam; dan (iii) golongan-golongan agama kecil tentu tidak bisa menyatukan dirinya dengan negara.<sup>18</sup>

Meski saling berbeda pandangan, golongan Islam dan golongan kebangsaan memiliki titik temu. Mereka tidak menolak adanya prinsip Ketuhanan. Hal itu nyata dalam pidato Soepomo:

“Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat *a religious*. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka, negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.”<sup>19</sup>

Akhirnya, setelah perdebatan yang terjadi sejak tanggal 29 Mei–1 Juni 1945, dari 60 anggota BPUPKI, ada 15 yang memilih dasar Islam, sedangkan suara terbanyak (45 orang) memilih dasar kebangsaan.<sup>20</sup>

Pada saat-saat inilah lahir ideologi Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila:

“Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, ia merumuskan Pancasila sebagai Kebangsaan Indonesia/Nasionalisme, Inter nasionalisme/Humanisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan. Beberapa hari sebelumnya, dua orang memberikan

17 Ibid., dalam catatan kaki no. 8.

18 Ibid. hlm. 10.

19 Ibid. hlm. 11.

20 Bdk. Yudi Latif, Ibid. hlm. 120, dalam catatan kaki no. 14.

usulan yang mirip—yaitu Mohammad Hatta—tetapi tanpa menyebut hal ideologi d

Prinsip Ketuhanan diterima oleh kalangan Muslim yang tidak senang Muncul perdebatan panas untuk mena *kewajiban menjalankan syariat Islam* guna menunjukkan peran eksplisit Islam didirikan. Tujuh kata itu akhirnya dim 1945, dan dikenal dengan nama Piagam

“Di dalam BPUPKI, Soekarno men nasionalisme yang bebas dari agama memang merupakan satu-satunya d pemimpin-pemimpin lainnya, maka pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila, ‘lima dasar’ yang akan Indonesia merdeka: Ketuhanan, Ke Kesejahteraan, dan Demokrasi. Wala umumnya diterima oleh anggota-ang para pemimpin Islam merasa tidak ser tidak akan memainkan peranan yang menyetujui suatu kompromi yang di menyebutkan bahwa negara akan d dengan kewajiban menjalankan sy pemeluknya.’ Implikasi Piagam Ja antara syariat Islam dan negara me pertentangan sengit di tahun-tahun m

Adolf Heuken—dalam komunikasi menyatakan bahwa sila pertama men Apa yang sebenarnya terjadi pada 18 disahkan dengan pembukaannya yang

21 Bdk. Subanar, Op.Cit., hlm. 174, dalam catatan kaki mengikuti E. Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Me* BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 150; G. Mc. T. Kahli (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hlm. 123-125 *the Twentieth Century* (London: Frederick A. Praeger, on June 1, 1945, he formulated Pancasila as Indo Internationalism/Humanitarianism, Unanimous Cons Lordship. The days before, there were two others pro Yamin and R. Soepomo—of similar ideas without men

22 Bdk. Ricklefs, Op.Cit., hlm. 424.

usulan yang mirip—yaitu Mohammad Yamin dan Soepomo—tetapi tanpa menyebut hal ideologi dasar negara."<sup>21</sup>

Prinsip Ketuhanan diterima oleh semua pihak, tetapi ada kalangan Muslim yang tidak senang dengan rumusan Soekarno. Muncul perdebatan panas untuk menambahkan tujuh kata: "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" guna menunjukkan peran eksplisit Islam bagi negara yang akan didirikan. Tujuh kata itu akhirnya dimasukkan pada tanggal 22 Juni 1945, dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

"Di dalam BPUPKI, Soekarno mendesak agar versinya tentang nasionalisme yang bebas dari agama disetujui. Karena konsep ini memang merupakan satu-satunya dasar yang dapat disepakati pemimpin-pemimpin lainnya, maka menanglah Soekarno. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dia mengemukakan doktrin Pancasila, 'lima dasar' yang akan menjadi falsafah resmi dari Indonesia merdeka: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi. Walaupun dasar-dasar ini pada umumnya diterima oleh anggota-anggota Badan Penyelidik, tetapi para pemimpin Islam merasa tidak senang karena Islam tampaknya tidak akan memainkan peranan yang istimewa. Akhirnya, mereka menyetujui suatu kompromi yang disebut 'Piagam Jakarta' yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan pada 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.' Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara syariat Islam dan negara menjadi sumber pertentangan-pertentangan sengit di tahun-tahun mendatang."<sup>22</sup>

Adolf Heuken—dalam komunikasi lisan pada 2 Maret 2018—menyatakan bahwa sila pertama memang menjadi ganjalan besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada 18 Agustus 1945, saat Konstitusi disahkan dengan pembukaannya yang tidak lagi memuat tujuh kata?

21 Bdk. Subanar, *Op.Cit.*, hlm. 174, dalam catatan kaki no. 212. Untuk rumusan ini, Budi Subanar mengikuti E. Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 150; G. Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hlm. 123-125; dan Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century* (London: Frederick A. Praeger, 1971), hlm. 101-102. "In Soekarno's speech on June 1, 1945, he formulated Pancasila as Indonesian Nationhood/Indonesian Nationalism, Internationalism/Humanitarianism, Unanimous Consensus/Democracy, Social Welfare, The One Lordship. The days before, there were two others proposals—those were launched by Mohammad Yamin and R. Soepomo—of similar ideas without mentioning the basic ideology of the State."

22 Bdk. Ricklefs, *Op.Cit.*, hlm. 424.

Seorang tokoh dari Indonesia Timur (Minahasa, apakah bernama Sam Ratulangi?) mendatangi Mohammad Hatta dan menyatakan: "Kalau tujuh kata dipertahankan, kami tidak ikut." Bung Hatta segera berkonsultasi dengan teman-teman Muslimnya, dan dalam situasi urgen, akhirnya diputuskan bahwa tujuh kata itu dihilangkan.

Kita tidak tahu persis bagaimana peristiwa itu terjadi. Di satu sisi, ada yang menafsir bahwa "kisah" itu hanyalah permainan Mohammad Hatta saja. Sementara itu, Soekarno tentu senang bahwa versi Pancasila kembali ke versi asli. Di sisi lain, apapun yang terjadi, penghilangan tujuh kata itu adalah gestur yang luar biasa hebat dari pihak mayoritas Islam kepada seluruh minoritas lain di Indonesia. Gestur ini sangat khas Nusantara! Bahasa Indonesia yang berasal dari suku kecil di daerah Riau juga dijadikan bahasa nasional, meskipun suku terbesar saat itu adalah Jawa. Masih menurut Adolf Heuken, barangkali dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan, Soekarno kemudian memutuskan membuat Kementerian Agama (memenuhi permintaan Natsir).

#### IV. Praktik Pemilahan Agama dan Negara

##### (I.J. Kasimo dan Mgr. A. Soegijapranata, S.J.)

Soekarno sebagai pendiri bangsa tumbuh besar menemukan nasionalisme "sekuler" untuk menyatukan semua kekuatan pergerakan melawan penjajahan Belanda. Nasionalisme ini, dalam formulasi Pancasila, menekankan pentingnya Ketuhanan sebagai landasan bagi negara yang dia cita-citakan. Senapas dengan perjuangan Soekarno di tahun 1920-an, para murid van Lith dari Kolese Xaverius,<sup>23</sup> Muntilan, Ignatius Joseph Kasimo (1900-1986) dan Mgr. Albertus Magnus Soegijapranata, S.J. (1896-1963), tumbuh berkembang dalam semangat nasionalisme. Karena mereka sendiri berasal dari lingkungan yang beragama, mereka sepakat sejak awal bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersikap positif

23 Floribertus Hasto Rosariyanto, S.J., *Father Van Lith, S.J. (1863-1926): Turning Point of the Catholic Church's Approach in the Pluralistic Indonesian Society (Excerpta ex Dissertationes ad Doctoratum in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificae Universitatis Gregoriana, Romae, die 16 mensis iunii 1997)*, (Roma: Universitas Gregoriana, 1997), hlm. 1: "Fransiscus Georgius Josephus van Lith was born on May 17, 1863, at Oirschot, Brabant, the Netherlands. On September 18, 1881, Frans van Lith entered the novitiate of the Dutch Jesuits at Mariëndaal. (...) Kolese Xaverius resmi berdiri tahun 1910, tetapi sejak 1904 sudah dimulai dengan berdirinya sekolah guru-bantu yang akan mengajar dengan bahasa setempat (Jawa) (*Kweekschool-A*), dan di tahun 1906 dibuka *Kweekschool-B* (sekolah guru yang akan mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda).

kepada agama. Kasimo berjuang lewat menyebut nama "Katolik" (*Pakempas* nantinya menjadi Partai Katolik). Mgr. Uskup Katolik yang dengan sendirinya melakukan sesuatu yang penting.

Tokoh-tokoh awal Katolik pribumi mempersoalkan Pancasila, dan dalam menerjemahkan Pancasila sebagai ideologi dan agama.

Kasimo terkenal dengan prinsip di mana-mana: *salus populi suprema lex* (hukum tertinggi). Terjemahan konkret di tiga bidang: memperjuangkan keadilan, mengembangkan kesejahteraan bagi rakyat (dan buta huruf). Selain itu, Kasimo juga *pro ecclesia et patria* (demi Gereja dan gurunya, van Lith, Kasimo melihat praktik praktis adalah cara mewujudkan iman).

Namun, perjuangan iman tidak mencampurkan agama dan politik. Kasimo mengikuti garis yang telah ditetapkan dalam soal relasi agama dan politik.

"Partai Katolik tidak ada hubungan dengan Partai Katolik meskipun keduanya berurusan dengan masyarakat. Gereja Katolik berjuang untuk rohani, sedangkan Partai Katolik

24 Bdk. J.B. Soedarmanta, *Politik Bermartabat: Biografi Kasimo* (2011), hlm. 164-165. "Ada satu prinsip Kasimo yang menjadi moto Partai Katolik, yaitu *salus populi suprema lex* (hukum tertinggi). (...) Ungkapan ini diambil dari salah satu pasal dalam UUD 1959 (106-43 SM)". Prinsip inilah yang membuat Kasimo seorang pejuang Katolik yang sejati. Misi Gereja Katolik membudayakan manusia Indonesia ke arah kemajuan. Istilah "*salus populi suprema lex*" bisa ditafsir sebagai akhir apa itu "*salus populi*", lengkapnya *salus populi in salutem salutis est*). Namun, Kasimo tampaknya hanya mementingkan Kasimo, kepentingan umum sederhananya adalah kesejahteraan banyak. (Bdk. penjelasan Ibid. hlm. 165-168). Kasimo, setiap warga negara, "demokrasi" sebagai sarana untuk "kesejahteraan bangsa" (melepaskan rakyat dari belenggu 169).

kepada agama. Kasimo berjuang lewat partai politik yang sejak awal menyebut nama "Katolik" (*Pakempalan Politik Katolik Djawa* yang nantinya menjadi Partai Katolik). Mgr. A. Soegijapranata, S.J. adalah Uskup Katolik yang dengan sendirinya memandang agama sebagai sesuatu yang penting.

Tokoh-tokoh awal Katolik pribumi dari Jawa ini tidak pernah mempersoalkan Pancasila, dan dalam praktik politiknya, mereka menerjemahkan Pancasila sebagai ideologi yang memilah negara dan agama.

Kasimo terkenal dengan prinsip yang dia pegang dan dia ulang di mana-mana: *salus populi suprema lex* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Terjemahan konkret dari prinsip itu ada dalam tiga bidang: memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan mengembangkan kesejahteraan bagi semua (melawan kemiskinan dan buta huruf). Selain itu, Kasimo juga selalu mengusung semboyan *pro ecclesia et patria* (demi Gereja dan Tanah Air). Mengikuti jejak gurunya, van Lith, Kasimo melihat bahwa terlibat dalam politik praktis adalah cara mewujudkan imannya sebagai orang kristiani.<sup>24</sup>

Namun, perjuangan iman dalam politik ini bukan pencampuran agama dan politik! Dalam perjuangan ini, Kasimo mengikuti garis yang telah ditetapkan oleh Hierarki Gereja Katolik dalam soal relasi agama dan politik.

"Partai Katolik tidak ada hubungan struktural dengan Gereja Katolik meskipun keduanya berurusan dengan manusia dan masyarakat. Gereja Katolik berjuang untuk memenuhi kebutuhan rohani, sedangkan Partai Katolik berjuang untuk memenuhi

24 Bdk. J.B. Soedarmanta, *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2011), hlm. 164-165. "Ada satu prinsip Kasimo yang sering diungkapkan dan menjadi moto Partai Katolik, yaitu *salus populi suprema lex* (kesejahteraan umum adalah hukum tertinggi). (...) Ungkapan ini diambil dari salah satu tulisan Cicero (Marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)". Prinsip inilah yang membuat Kasimo terjun total ke dalam dunia politik. "Kedua, *pro ecclesia et patria* (untuk Gereja dan Tanah Air). Kasimo adalah contoh seorang pejuang Katolik yang sejati. Misi Gereja Katolik di Indonesia adalah untuk turut membudayakan manusia Indonesia ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bangsa." Istilah "*salus populi suprema lex*" bisa ditafsir sebagai "caesarisme" (bahwa Kaisar menjadi penentu akhir apa itu "*salus populi*", lengkapnya *salus populi suprema lex (sed) Caecar (Princeps) legibus salutus est*). Namun, Kasimo tampaknya hanya menafsirkan istilah itu secara sederhana. Bagi Kasimo, kepentingan umum sederhananya adalah kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. (Bdk. penjelasan Ibid. hlm. 165-168). *Salus populi* bagi Kasimo adalah "keadilan" bagi setiap warga negara, "demokrasi" sebagai sarana dan tujuan perwujudan kehendak rakyat, dan "kesejahteraan bangsa" (melepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan kebodohan) (Ibid. hlm 169).

memandang soal politik. Dari sejarah di Eropa, mereka belajar apa artinya negara modern (yang tidak lagi memimpikan teokrasi). Di Eropa pula, mereka mengalami apa artinya sekularisme (pemisahan agama dan negara) yang mesti disikapi dengan hati-hati (apalagi semangat orang Timur cenderung religius, dan sama seperti di Belanda, Katolik juga agama minoritas di Indonesia). Dari hal seperti itulah, bisa dibayangkan mereka lantas membuat ramuan khas antara di satu sisi, pentingnya religiositas manusia, dan di sisi lain, pentingnya membuat pemilahan tegas antara negara dan agama. ❁

## Daftar Pustaka

- Adams, Cindy, 2018. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Edisi revisi cetakan ke-5 [cetakan pertama 2007]) (Terj. Soekarno *an Autobiography as Told to Cindy Adams*, New York: The Bobbs-Merril Company Inc., 1965), Syamsu Hadi (Penerjemah). Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo.
- de Beaufort, Fleur and van Schie, Patrick, 2008. "The Separation of Church and State in the Netherlands". Dalam Fleur de Beaufort, Ingemund Hägg, dan Patrick van Schie (eds.), *Separation of Church and State in Europe with Views on Sweden, Norway, the Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia, and Greece*. Brussels: European Liberal Forum.
- Danuwinata, F., 2006. "Pengantar". Dalam A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Drijarkara, Prof. Dr. N., "Pantja Sila and Religion", Ministry of Informaton Republic of Indonesia, Djakarta (July 1959) (foreword by R. M. Harjoto, the General Secretary of the Ministry of Informaton).
- \_\_\_\_\_, 2006. "Pancasila dan Religi". Dalam A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 2006. "Filsafat Kehidupan Negara" dalam A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gazalba, Sidi, 1967. *Demokrasi dalam Persoalan: Pembijtaraan Masalah Demokrasi dalam Rangka Problematik Konsep Demokrasi Pantjasila*. Penerbit N. V. Adnoes & Co.

- Harjanto, Wahyu, 2013. "Meringkus' Drijarkara: Peran Politik Drijarkara Menjelang 1965 dan Sesudahnya". Dalam G. Budi Subanar (ed.), *Oase Drijarkara: Tafsir Generasi Masa Kini*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Heuken, Adolf, 2009. *15 Tahun Serikat Jesus Berkarya di Indonesia*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Latif, Yudi, 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (Cetakan pertama 2014). Jakarta: Penerbit Mizan.
- NN, *Tuntunan bagi Kader Buruh Pantjasila 1*. Jakarta: Sentral Organisasi Buruh Pantjasila (1 Djanuari 1960) (tertanda Ketua Umum: P. Gitomartojo).
- Ricklefs, M. C., 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Cetakan pertama 2005) (Terj. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* [2001], Third Edition. Hampshire, Inggris: Palgrave). Jakarta: PT. Serambil Ilmu Semesta.
- Rosariyanto, Floribertus Hasto, *Father Van Lith, S.J. (1863-1926): Turning Point of the Catholic Church's Approach in the Pluralistic Indonesian Society* (Excerpta ex Dissertationes ad Doctoratum in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificae Universitatis Gregoriana, Romae [16 mensis Iunii 1997]).
- Setyo Wibowo, A., 2015. "Ketuhanan Yang Maha Esa dan Filsafat Kompromi Khas Indonesia" dalam Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C. B. Mulyatno dan Otto Gusti Madung (eds.), *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soedarmanta, J.B., 2008. *Beek SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut*. Jakarta: Penerbit Obor.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Steenbrink, Karel, 2016. "Jesuits in Indonesia, 1546–2015" dalam *Jesuit Historiography Online*. Diunduh pada 1 Januari 2018 dalam [http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723\\_jho\\_COM\\_192544](http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192544) (Diunggah pertama pada 2016).
- Subanar, Gregorius Budi, 2001. *The Local Church in the Light of Magisterium Teaching on Mission: A Case in Point: The Archdiocese of Semarang-Indonesia (1940-1981)*. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Kilasan Kisah Soegijapranata*. Yogyakarta: Penerbit USD (bekerja sama dengan KPG–Kepustakaan Populer Gramedia).
- Sudimin, Theodorus dan Gunawan, Yohanes, 2015. *Semangat dan Perjuangan Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J.* Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.

- Sutrisno, F. X. Mudji, 2000. *Drijarkara Penulis*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Verhaak, Prof. Dr. Christ, 1988. "Gaya Pemikiran Drijarkara". Dalam *Bunga Drijarkara, S.J. dan Pemikiran Filosofis* STF Drijarkara (dalam rangka Dies



Sutrisno, F. X. Mudji, 2000. *Driyarkara: Dialog-dialog Panjang Bersama Penulis*. Jakarta: Penerbit Obor.

Verhaak, Prof. Dr. Christ, 1988. "Gagasan Sentral dan Perkembangan Pemikiran Driyarkara". Dalam *Bunga Rampai Mengenang Prof. Dr. N. Driyarkara, S.J. dan Pemikiran Filosofisnya*. Jakarta: Senat Mahasiswa STF Driyarkara (dalam rangka Dies Natalis XX STF Driyarkara).

Inilah *Festschrift* bagi Prof. Dr. A. Sudiarja, S.J., kumpulan refleksi bertema humanisme dari para koleganya. Esai-esai yang ada di dalamnya umumnya mengikuti ragam minat filosofis dari Romo Sudiarja. Hal ini berarti, kajian filsafat ataupun nonfilsafat di dalam buku ini berusaha untuk mencari jalan-jalan baru untuk membangun kemanusiaan dalam multidimensi bidang yang melingkupinya.

**R**entang pembahasannya dibuka oleh dialog dengan tradisi Hindhu-Buddha, Filsafat Timur. Kajian ini mengajak untuk membuka ruang pertemuan dengan berbagai budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat kita. Lalu, dilanjutkan dengan tafsir Pancasila, pembahasan tentang agenda kebebasan beragama dan tantangan hidup beragama di tengah tantangan era *post-truth*, yang memberi kita pencerahan tentang bagaimana menghidupi dimensi sosial politik konkret di Indonesia. Kemanusiaan kita juga diperkaya oleh karya sastra. Pembacaan dua novel *Silence* karya Shusaku Endo dan *Va' Dove Ti Porta Il Cuore* karya Susanna Tamaro membuka berbagai sisi kemanusiaan kita: penghayatan iman dan dialog dengan budaya setempat, feminisme, spiritualitas.

#### KONTRIBUTOR

F. Wawan Setyadi, M.Phil.  
Dr. Gregorius Budi Subanar  
Dr. Matius Ali  
Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi  
Dr. Karlina Supelli  
Dr. Al. Andang L. Binawan  
Dr. A. Setyo Wibowo  
Prof. Dr. J. Sudarminta  
Prof. Dr. M. Sastrapratedja  
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno  
Dr. Novita Dewi  
Dr. Thomas Hidya Tjaya  
Dr. Hieronimus Y. Dei Rupa

Perkembangan pesat teknologi, ilmu pengetahuan, budaya dan hidup sosial menuntut definisi ulang konsep humanisme. Tantangan bagi kemanusiaan kita di zaman kontemporer ini dibahas dengan mencermati krisis atensi terhadap orang di sekitar kita akibat terlalu sibuk dengan gawai, serta memahami esensi teknologi dan memikirkan ulang relasi kita dengannya di zaman kontemporer ini.

Buku ini menghadirkan berbagai dimensi kemanusiaan kita: etika, humanisme, politik, agama dan spiritualitas, dialog budaya. Kita diajak untuk menelusuri kedalaman dan keruwetan berbagai dimensi kemanusiaan kita itu dan pada saat yang bersamaan berusaha untuk menggapai jalan-jalan baru untuk membangunnya.



[buku@kompas.com](mailto:buku@kompas.com) [@BukuKOMPAS](https://www.instagram.com/BukuKOMPAS) [Penerbit Buku Kompas](https://www.facebook.com/Penerbit.Buku.Kompas) [@bukukompas](https://www.tumblr.com/@bukukompas)

Philosophy



581812103

Harga P. Jawa Rp 79.000



ISBN 978-602-412-511-0

ISBN 978-602-412-510-3